

LAPORAN THESIS

**PERLINDUNGAN KERAHASIAAN MEDIS
DALAM MEDIASI ELEKTRONIK, KAJIAN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN**



**TANDEAN ANDRE WIBOWO
NIM 25.C2.0058**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

LAPORAN THESIS

**PERLINDUNGAN KERAHASIAAN MEDIS
DALAM MEDIASI ELEKTRONIK, KAJIAN BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana S2**



**TANDEAN ANDRE WIBOWO
NIM 25.C2.0058**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan kerahasiaan medis dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik yang kian relevan di era digitalisasi pelayanan kesehatan. Penggunaan teknologi informasi dalam mediasi memang meningkatkan efisiensi, namun juga menimbulkan risiko terhadap keamanan data dan privasi pasien. Permasalahan hukum yang timbul adalah sejauh mana kerahasiaan medis dilindungi oleh peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan bagaimana kesesuaiannya dengan praktik mediasi elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan hukum terhadap kerahasiaan medis dalam mediasi elektronik, menilai kecukupan norma yang berlaku, serta memberikan rekomendasi normatif untuk memperkuat perlindungan hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terhadap ketentuan internasional, khususnya *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa dan *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA) di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan perlindungan kerahasiaan medis dalam peraturan nasional belum sepenuhnya memadai karena belum diatur secara rinci mengenai standar teknis keamanan data, autentikasi pengguna, enkripsi, dan audit elektronik dalam pelaksanaan mediasi. Selain itu, terdapat potensi benturan norma antara kewajiban menjaga rahasia medis dengan kebutuhan membuka informasi untuk kepentingan penyelesaian sengketa. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung merevisi PERMA No. 3 Tahun 2022 dengan menambahkan ketentuan teknis perlindungan data elektronik, serta mendorong pembentukan lembaga pengawas independen dan peningkatan kompetensi mediator dalam menjaga kerahasiaan medis sebagai bentuk perlindungan hak privasi pasien di era digital.

Kata Kunci: kerahasiaan medis, mediasi, mediasi elektronik

ABSTRACT

This study examines the legal protection of medical confidentiality in dispute resolution through electronic mediation, which has become increasingly relevant in the era of digital health services. The integration of information technology into mediation enhances efficiency but simultaneously raises significant risks to patient data security and privacy. The main legal issue addressed is the extent to which medical confidentiality is protected under national legislation, particularly Law Number 17 of 2023 on Health, and its alignment with the implementation of electronic mediation as regulated in Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 on Electronic Court Mediation. The objective of this research is to analyze the adequacy of legal guarantees for medical confidentiality in electronic mediation, evaluate the sufficiency of existing norms, and formulate normative recommendations to strengthen legal protection in this context. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, referencing international instruments such as the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) and the United States' Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). The findings reveal that the current national regulations are insufficient in ensuring the technical and procedural security of medical data, as they lack clear standards for encryption, user authentication, and digital audit mechanisms. Furthermore, there exists a normative tension between the obligation to maintain medical secrecy and the procedural need to disclose certain information during dispute resolution. This study recommends that the Supreme Court amend Regulation No. 3 of 2022 to include specific provisions on electronic data protection standards, establish an independent supervisory body, and enhance the capacity of mediators to uphold medical confidentiality, thereby reinforcing patients' right to privacy within the digital legal framework.

Keywords: medical confidentiality, mediation, electronic mediation